



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan: 1. Menteri Perindustrian; 2. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	39 (tiga puluh sembilan)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 23 Oktober 2018
W a k t u	:	Pukul 15.35 s.d 16.20 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), didampingi oleh: 1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/FPAN); 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FGerindra); 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPD); 4. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FHanura).
Sekretaris Rapat	:	Suastri Rejeki, S.E, M.M. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian dan BSN Tahun 2019, sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI untuk ditetapkan.
Hadir	:	1. 27 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Perindustrian beserta jajaran; 3. Kepala BSN beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Kepala BSN dibuka pada pukul 15.35 WIB dan rapat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda rapat kerja adalah membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian dan BSN Tahun 2019, sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI untuk ditetapkan, berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/17347/DPR RI/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal Penyampaian Perubahan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA 2019 serta surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor

AG/18704/DPR RI/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, mengenai Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN 2019, sebagai bahan Penyempurnaan RKA K/L di komisi dengan mitra kerjanya dan meminta agar hasil penyempurnaan RKA K/L (**rincian perprogram**) disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan, paling lambat tanggal 24 Oktober 2018.

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Perindustrian dan Kepala BSN untuk menjelaskan mengenai Anggaran Belanja Kementerian Perindustrian dan BSN dalam APBN Tahun Anggaran 2019 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas penjelasan Menteri Perindustrian dan Kepala BSN.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Komisi VI DPR RI menyetujui **pagu anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2019** untuk ditetapkan Badan Anggaran, berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/18704/DPR RI/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI tanggal 17 September 2018, sebesar **Rp3.589.324.559.000,00** (tiga triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan dalam 9 (sembilan) program, yaitu:

- (1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Rp241.689.149.000,00 (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (2) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Rp111.632.821.000,00 (seratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- (3) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Rp123.079.282.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- (4) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Rp126.731.100.000,00 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- (5) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp379.810.561.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- (6) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Rp45.449.543.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- (7) Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Rp655.489.735.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (8) Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri, dan Akses Industri Internasional Rp119.379.658.000,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (9) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Rp1.786.062.710.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

B. BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran **Badan Standardisasi Nasional Tahun 2019** untuk ditetapkan Badan Anggaran, berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/18704/DPR RI/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI tanggal 17 September 2018, sebesar **Rp231.619.639.000,00** (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang dialokasikan untuk:

- (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN sebesar Rp114.686.177.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (2) Program Pengembangan Standardisasi Nasional sebesar Rp116.933.462.000,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Catatan:

Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan mengenai kegiatan dalam program, terutama mengenai skala prioritas kegiatan Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.20 WIB.